

PENGUMUMAN
PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI KE-2 MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
SEMESTER GASAL TA. 2023/2024
S.Peng./~~766~~/UHT.B1.02/IX/2023

Berdasarkan hasil Rapat Komisi Skripsi tertanggal 18 September 2023, berikut hasil pengajuan judul skripsi tahap ke-2 semester Gasal 2023/2024 :

NO	NAMA	NIM	JUDUL	KET	USULAN PEMBIMBING
1	Maulana Magdum Ibrahim (Pidana)	20200610025	Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Anggota POLRI mengkonsumsi Narkotika (Ditinjau dari kasus Kombes Yulius Nyabu bareng Perempuan di kamar Hotel) Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penerapan pidana bagi Anggota Polri yang menggunakan Narkotika? 2) Apakah ada pertimbangan khusus bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian?	Disetujui	1. Dr. Dewi Setyowati, SH., MH 2. Dr. Adriano, SH., MH
2	Agnes Hilda Natalia (Pidana)	20180610002	Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan perempuan (Tinjauan kasus Menyembunyikan Anak ,dan Melarikan Anak Perempuan) Rumusan Masalah: 1) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan perampasan kemerdekaan 2) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban	Disetujui	1. Dr. Dewi Setyowati, SH., MH 2. Dr. Adriano, SH., MH

3	Fanny Ordelia K (Pidana)	20200610039	<p>Tinjauan Hukum Penggunaan Perangkat Audio Telinga (<i>Earphone</i>) Saat Berkendara</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana dampak penggunaan earphone saat berkendara? 2) Bagaimana pandangan hukum dalam penggunaan earphone saat berkendara? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurul Hudi, SH., MH 2. Bambang Ariyanto, SH., MH
4	Nur Anisa Habiballah (Pidana)	20200610043	<p>Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana aborsi</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penerapan hukum pidana materiil terhadap korporasi dalam tindak pidana aborsi 2) Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana aborsi 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Eko Pujiyono, SH., MH 2. Dr. Adriano, SH., MH
5	Alifia Sheifa Maharani Putri (Pidana)	20200610042	<p>Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kalangan Masyarakat</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Upaya Hukum Apa Yang Dapat Dilakukan Dalam Menanggulangi Peredaran Kosmetik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar 2) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Masyarakat Terhadap Produk Kosmetik Ilegal 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. M. Khoirul Huda, SH., MH 2. Dr. Dewi Setyowati, SH., MH
6	Felia Anisa Indah Farida (Perdata)	20200610027	<p>Kedudukan Lagu dan Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Kredit Perbankan</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses penilaian dan penentuan nilai lagu dan ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit oleh lembaga keuangan 2) Dampak dari penggunaan lagu dan ekonomi kreatif sebagai jaminan kredit 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Tri Rusti Maydrawati, SH., MH 2. Dr. Ninis Nugraheni, SH., MH

			perbankan terhadap perkembangan industri musik dan sektor perbankan		
7	Panglima Jalaghazi Aryatama (Perdata)	20200610001	<p>Analisis Perubahan Klausul <i>Terms of Service</i> Secara Sepihak dalam Konsep Perjanjian: Perspektif Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana perubahan klausul <i>Terms of Service</i> secara sepihak oleh penyedia layanan online dapat dikaitkan dengan konsep perjanjian hukum kontrak? 2) Apa dampak perubahan klausul <i>Terms of Service</i> secara sepihak terhadap perlindungan konsumen, dalam konteks perlindungan hak dan kepentingan mereka? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Ninis Nugraheni, SH., MH 2. Nikmah Mentari, SH., MH
8	Syahban Alvian Hamonangan Harianja (Perdata)	20200610037	<p>Penerapan Prinsip "Separate patrimony" terhadap Penjelasan Perseroan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa Perubahan yang terjadi pada penjelasan Perseroan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2) Akibat hukum tidak adanya prinsip "separate patrimony" dalam Perseroan Terbatas. 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Tri Rusti Maydrawati, SH., MH 2. Nikmah Mentari, SH., MH

9	Nadia Intan Dwi Parawansa (Pidana)	20200610044	<p>Penegakan hukum terhadap pelanggaran gas buang kendaraan bermotor</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana ketentuan Gas buang kendaraan bermotor? 2) Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran gas buang kendaraan bermotor? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Adriano, SH., MH 2. Bambang Ariyanto, SH., MH
10	Amelia Dwi Rahma (Pidana)	20200610028	<p>Anggota TNI menahan kepala basarnas dan menetapkan status tersangka Studi Kasus Basarnas</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah KPK berwenang untuk menyidik perkara korupsi di anggota TNI ? 2) Sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi ? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Adriano, SH., MH 2. Dr. Budi Pramono, SH., MH
11	Oktavia Brian Lukna Maharani (Pidana)	20200610035	<p>Tinjauan Hukum Terhadap Kekuasaan Hakim Dalam Pelaksanaan Pengadilan HAM AD HOC Terhadap Prinsip Asas Legalitas</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah latar belakang perlunya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan undang undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman? 2) Apa implikasi keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undanf No 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Adriano, SH., MH 2. Dr. Zamroni, SH., MH

12	Tyar Jihan Hana Nabilah (Pidana)	20200610004	<p>Penegakan Hukum Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Dalam Perkara Ibu Masriah</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persoalan Kewenangan Satpol PP Sebagai Penuntut Dalam Tindak Pidana Ringan 2) Aspek Penegakan Hukum Dalam Kasus Ibu Masriah 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurul Hudi, SH., MH 2. Kamarudin, SHI., LLM
13	Diana Pratiwi (Pidana)	20190610056	<p>Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kontribusi Pembaharuan Hukum Pidana.</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana sanksi untuk koruptor pada pembaharuan hukum pidana 2) Apakah kebijakan hukum pidana tersebut dapat di realisasikan 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurul Hudi, SH., MH 2. Dr. Adriano, SH., MH
14	Muchamad Gilang Maulana (Pidana)	20200610029	<p>Perilaku Seksual Terhadap anak dibawah umur dalam hubungan yang bersifat sukarela (studi kasus satria mahathir)</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan hubungan seksual dengan suka rela atau pada dasar suka sama suka. 2) Proses hukum apa yang terjadi dalam menangani kasus hubungan seksual yang terjadi dengan sukarela yang dilakukan oleh satria mahathir. 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Dewi Setyowati, SH., MH 2. Dr. Zamroni, SH., MH

15	Yusian Mutiara Septa (Perdata)	20200610002	<p>Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Securities Crowdfunding Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2023</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana konsep securitirs crowdfunding di Indonesia? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang menggunakan sistem Securities Crowdfunding? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wishnu Kurniawan, SH., MH 2. Nikmah Mentari, SH., MH
16	Cindy Octavia Nurdaya (Perdata)	20200610036	<p>Pembatasan Kewenangan Debt Collector dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan</p> <p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Batas wewenang debt collector ditinjau dari Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2) Tanggung gugat debt collector atas pelaksanaan eksekusi yang dilakukan diluar kuasanya 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. M. Khoirul Huda, SH., MH 2. Dr. Ninis Nugraheni, SH., MH
17	Gavin Adiva Ramudia (Perdata)	20200610049	<p>Perlindungan paten sebagai sumber daya genetik dalam perspektif <i>blue and green economy</i></p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana hak komunal dan hak pribadi dalam paten obat? 2) Apa implikasi perlindungan paten terhadap akses publik sebagai sumber daya genetik dan potensi terhadap pembangunan berkelanjutan? 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Tri Rusti Maydrawati, SH., MH 2. Dr. Eko Pujiyono, SH., MH

18	Dhinta Andi Surya (Perdata)	20170610010	<p>Tinjauan yuridis terhadap putusan 562/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. perkara wanprestasi antara QNB melawan BOSOWA Group</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apa bentuk gugatan yang tepat terhadap perkara wanprestasi tersebut 2) Apakah putusan hakim sudah tepat dengan tidak mengabulkan gugatan tergugat pada perkara tersebut 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Eko Pujiyono, SH., MH 2. Dr. M. Zamroni, SH., MH
19	Maulana Alfiansyah F (Pidana)	20200610031	<p>Pengaturan hukum dalam tindak pidana penipuan menggunakan media internet berupa jual-beli online</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bagaimana pengaturan hukum di indonesia terhadap tindak pidana penipuan dalam cybercrime 2) Peraturan apa saja yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam tindak pidana berupa jual-beli online 	Disetujui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Dewi Setyowati, SH., MH 2. Dr. Tri Rusti Maydrawati, SH., MH

Surabaya, 19 September 2023

Ka. Prodi S1



Wishnu Kurniawan, SH., MH

NIP. 01682